JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi
E-ISSN: 2686-5238
P-ISSN: 2686-4916
https://dinastirev.org/JEMSI dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jemsi.v7i3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 07 Desember 2025 | **Revised:** 30 Desember 2025 | **Accepted:** 16 Januari 2026

Meningkatkan Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa: Analisis Kompetensi PPK, Kapabilitas Penyedia dan Implementasi e-Katalog

Robin Tampubolon[1], Hapzi Ali[2]
[1]Universitas Terbuka, Indonesia, putrarobin98@gmail.com
[2]Universitas Terbuka, Indonesia, hapzi.ali@gmail.com

Corresponding author: putrarobin98@gmail.com[1]

Abstract: *Improving the Performance of Procurement of Goods and Services: Analysis of PPK Competence, Provider Capabilities and Implementation of e-Catalog is a scientific article of literature study in the scope of HR. The purpose of this article is to build a hypothesis of the influence between variables that will be used in further research. The research object is in online libraries, Google Scholar, Mendeley and other academic online media. The research method with library research is sourced from e-books and open access e-journals. Qualitative descriptive analysis. The results of this article: 1) PPK Competence influences the Performance of Procurement of Goods and Services; 2) Provider Capabilities influence the Performance of Procurement of Goods and Services; and 3) Implementation of e-Catalog influences the Performance of Procurement of Goods and Services.*

Keywords: *Goods and Services Procurement Performance, PPK Competence, Provider Capabilities, e-Catalog Implementation*

Abstrak*:* Meningkatkan Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa: Analisis Kompetensi PPK, Kapabilitas Penyedia dan Implementasi e-Katalog adalah artikel ilmiah studi literatur dalam lingkup SDM. Tujuan artikel ini adalah untuk membangun hipotesis pengaruh antar variabel yang akan digunakan dalam penelitian lebih lanjut. Objek penelitian adalah perpustakaan online, Google Scholar, Mendeley dan media online akademik lainnya. Metode penelitian dengan riset pustaka bersumber dari e-book dan jurnal elektronik akses terbuka. Analisis deskriptif kualitatif. Hasil artikel ini: 1) Kompetensi PPK berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa; 2) Kapabilitas Penyedia berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa; dan 3) Implementasi e-Katalog berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa.

Kata Kunci*:* Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa, Kompetensi PPK, Kemampuan Penyedia, Implementasi e-Katalog

PENDAHULUAN

PBJ dalam sektor publik memegang peranan fundamental dalam manajemen keuangan negara, khususnya dalam menjamin alokasi sumber daya publik secara optimal dan terbuka. Sebagaimana diatur dalam Perpres No. 46 Tahun 2025, pemerintah menetapkan kewajiban pengadaan melalui platform e-Katalog guna mengoptimalkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan pengadaan. Meskipun demikian, observasi di lapangan mengindikasikan masih banyaknya praktik pengadaan yang menyimpang, khususnya dengan metode pengadaan langsung. Penyimpangan ini berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran, minimnya transparansi, serta ketidakpastian terhadap capaian yang diharapkan. Fenomena ini mengindikasikan adanya disparitas antara regulasi yang berlaku dan implementasi aktual di lapangan.

Prinsip Kinerja PBJ berfungsi sebagai landasan fundamental dalam mengevaluasi performa pengadaan publik. Pengukuran ini berfokus pada tingkat optimalisasi pemanfaatan sumber daya publik untuk mencapai manfaat tertinggi dengan biaya terendah, sembari menjaga mutu yang telah ditentukan (Ridwan & Anggrawati, 2021). Untuk mencapai prinsip tersebut, dibutuhkan sinergi antara kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kapabilitas penyedia barang/jasa, dan implementasi e-Katalog yang efektif. PPK yang kompeten mampu melaksanakan proses pengadaan secara profesional dan akuntabel (Mgimba, 2022; Matee, 2023), sedangkan penyedia yang memiliki kapabilitas teknologis dan manajerial tinggi dapat memastikan kualitas dan efisiensi hasil pengadaan (Lubis, 2022; Gunawan & Mutaqin, 2025). Sementara itu, implementasi e-Katalog yang baik akan memperkuat efisiensi biaya, transparansi, serta akuntabilitas publik (Irawan et al., 2025; Handayani et al., 2025). Artikel ini membahas pengaruh Kompetensi PPK, Kapabilitas Penyedia, dan Implementasi e-Katalog terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa, suatu kajian literature review dalam bidang MSDM.

Berdasarkan latar belakang, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk membangun hipotesis bagi penelitian selanjutnya, yaitu merumuskan:

a. Pengaruh Kompetensi PPK terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa;
b. Pengaruh Kapabilitas Penyedia terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa; dan
c. Pengaruh Implementasi e-Katalog terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa.

METODE

Pendekatan untuk menyusun tinjauan literatur melibatkan metodologi Penelitian Kepustakaan (library research) serta Tinjauan Literatur Sistematis (SLR), yang kemudian diinterpretasikan secara kualitatif. Sumber-sumber ini diperoleh dari platform daring seperti Google Scholar, Mendeley, dan repositori akademik daring lainnya.

Tinjauan Literatur Sistematis (SLR) merupakan sebuah prosedur yang terstruktur untuk menemukan, mengevaluasi, dan mensintesis seluruh bukti empiris yang relevan demi menjawab pertanyaan penelitian yang terfokus secara komprehensif (Kitchenham et al, 2009).

Pada konteks analisis kualitatif, studi literatur harus diaplikasikan selaras dengan prinsip-prinsip metodologis yang mendasarinya. Salah satu justifikasi utama untuk mengadopsi analisis kualitatif adalah sifat penelitian yang bersifat eksploratoris (Ali, H., & Limakrisna, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan latar belakang, tujuan dan metode, maka hasil artikel ini adalah sebagai berikut:

Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa

Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa dalam konteks kinerja sektor publik merefleksikan sejauh mana organisasi pemerintah mampu menciptakan nilai publik melalui pemanfaatan secara efisien dan efektif untuk menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Konsep ini tidak hanya menilai keberhasilan organisasi dari sisi keuangan, tetapi juga dari kemampuan instansi publik dalam memberikan kontribusi sosial, moral, dan emosional bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa dipahami sebagai ukuran multidimensional yang menekankan keseimbangan antara efisiensi pengelolaan sumber daya, efektivitas hasil kebijakan, legitimasi moral, serta kepuasan publik terhadap layanan pemerintah, Meynhardt et al. (2017)

Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa merupakan penilaian pengukuran kinerja di sektor publik yang berorientasi pada pencapaian keseimbangan antara input, proses, dan output untuk menghasilkan nilai terbaik bagi masyarakat. Konsep ini menekankan bahwa pengendalian dana publik harus dilakukan dengan konsep *value for money*, sehingga setiap pemanfaatan aset mampu memberikan hasil optimal sesuai tujuan organisasi. Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa tidak hanya mengukur seberapa besar penghematan biaya yang dicapai, tetapi juga menilai sejauh mana hasil kegiatan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi publik. Oleh karena itu, prinsip Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil (performance-based government), Ridwan dan Anggrawati (2021).

Dengan demikian, Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa merupakan ukuran komprehensif kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tidak hanya menekankan aspek finansial dan efisiensi biaya, tetapi juga mencakup nilai moral, transparansi, dan kepuasan publik. Dengan demikian, Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa dapat dipahami sebagai kemampuan instansi pemerintah dalam melaksanakan pengadaan secara ekonomis, efisien, dan efektif untuk memperoleh hasil terbaik bagi masyarakat, sekaligus menciptakan nilai publik melalui akuntabilitas dan tata kelola pengadaan yang bertanggung jawab.

Menurut Milani et al. (2025), Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa dapat diukur melalui beberapa dimensi utama yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa dalam mencapai tujuannya. Dimensi-dimensi tersebut meliputi :

1) Efektivitas: Mencapai tujuan pengadaan dengan hasil yang sesuai kebutuhan pengguna dan tepat waktu.
2) Efisiensi: Menggunakan sumber daya (waktu, biaya) secara optimal untuk mencapai hasil maksimal.
3) Kepuasan Pengguna: Mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap kualitas barang/jasa dan proses pengadaan.
4) Kualitas Pelayanan: Menilai standar pelayanan dalam proses pengadaan yang efisien, transparan, dan sesuai prosedur.
5) Akuntabilitas dan Kepatuhan: Memastikan proses pengadaan dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa ini sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah (Milani, Fadli, & Khalida, 2025), (Khotijah, 2025), (Hidayat, 2025), dan (Sari & Ali, 2024).

Kompetensi PPK

Kompetensi merupakan seperangkat kemampuan yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memungkinkan seseorang melaksanakan perannya secara efektif dalam organisasi publik. Kompetensi tidak hanya terbatas pada kemampuan teknis, tetapi juga mencakup kecakapan interpersonal, kepemimpinan, komunikasi, dan kemampuan adaptif dalam menghadapi dinamika lingkungan kerja. Dalam konteks sektor publik, kompetensi

berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa pegawai dapat memenuhi tanggung jawabnya sesuai standar profesionalisme dan akuntabilitas pelayanan public, Azevedo et al. (2020).

Kompetensi sebagai kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan nilai-nilai yang secara terpadu membentuk kemampuan individu dalam mencapai kinerja yang unggul di lingkungan manajemen publik. Kompetensi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup kemampuan konseptual dan manajerial, seperti berpikir strategis, memimpin tim, mengelola konflik, serta berinovasi dalam proses kerja. Kompetensi yang baik akan meningkatkan efektivitas organisasi publik, memperkuat tata kelola, dan memastikan setiap keputusan yang diambil berorientasi pada hasil dan nilai public, Tonelli et al. (2021)

Dengan demikian, kompetensi merupakan kemampuan menyeluruh yang mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan nilai-nilai profesional untuk mencapai tujuan organisasi publik secara efektif dan berintegritas. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, kompetensi terutama dibutuhkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengadaan secara profesional, transparan, serta sesuai prinsip Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa.

Dimensi Kompetensi Menurut Azevedo et al. (2020), kompetensi manajerial dalam organisasi publik terdiri atas sejumlah kemampuan inti yang mendukung efektivitas individu dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Dimensi-dimensi kompetensi tersebut meliputi:

1) Kompetensi Teknis (Technical Competence)
   Mencakup penguasaan keterampilan dan pengetahuan teknis yang relevan dengan bidang kerja. Dalam konteks sektor publik, ini termasuk pemahaman terhadap regulasi, prosedur operasional, dan sistem administrasi pemerintahan.
2) Kompetensi Manajerial (Managerial Competence)
   Berkaitan dengan kemampuan untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengevaluasi aktivitas organisasi. Kompetensi ini juga melibatkan kepemimpinan partisipatif, pengelolaan konflik, serta kemampuan mendorong kolaborasi lintas unit kerja.
3) Kompetensi Sosial dan Komunikatif (Social & Communication Competence)
   Menggambarkan kemampuan individu dalam menjalin komunikasi efektif, membangun hubungan interpersonal yang positif, serta bekerja sama dengan tim dan pemangku kepentingan lainnya.
4) Kompetensi Evaluatif (Evaluative Competence)
   Berkaitan dengan kemampuan untuk menilai kualitas proses dan hasil kerja, melakukan perbaikan berkelanjutan, serta memastikan pencapaian target organisasi publik secara terukur.

Kompetensi PPK ini sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya yaitu, (Aziz, 2025), (Illahi, 2025), (Putra & Aidy, 2025), dan (Natalia & Ali, 2024).

Kapabilitas Penyedia

Kapabilitas organisasi adalah kemampuan internal untuk mengelola, mengintegrasikan dan memanfaatkan sumber daya sumber daya organisasi termasuk pengetahuan, teknologi, dan proses kerja secara optimal guna memperkuat daya saing dan kinerja. Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, kapabilitas penyedia mencerminkan sejauh mana penyedia mampu menjalankan proses pengadaan secara efisien, berkualitas, dan tepat waktu dengan memanfaatkan teknologi digital, keahlian internal, dan koordinasi dengan instansi pemerintah, Lubis (2022).

Kapabilitas penyedia sebagai kemampuan strategis yang memungkinkan penyedia barang/jasa untuk beradaptasi, berinovasi, dan berkolaborasi dalam ekosistem pengadaan publik berbasis digital, demi mewujudkan efisiensi, akuntabilitas, dan nilai public, Gunawan & Mutaqin (2025)

Dengan demikian Kapabilitas penyedia adalah kemampuan strategis dan adaptif untuk mengelola sumber daya, teknologi, dan hubungan kelembagaan dalam ekosistem pengadaan digital, guna menciptakan proses pengadaan yang efisien, transparan, dan bernilai publik.

Dimensi Kapabilitas Penyedia Menurut Gunawan & Mutaqin (2025), dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah mencerminkan kemampuan strategis untuk beradaptasi, berinovasi, dan berkolaborasi dalam sistem pengadaan publik berbasis digital. Kapabilitas di sini dipahami bukan hanya sebagai kemampuan teknis operasional, melainkan sebagai kapasitas kelembagaan yang mendukung terciptanya efisiensi, akuntabilitas, dan nilai publik (public value).

Kapabilitas penyedia sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, di antaranya adalah (Asfirah, Nafillah, Adi, & Widyaningrum, 2025), (Hendrasworo, 2025), dan (Nugroho, 2024).

Implementasi e-Katalog

Menurut Nani dan Ali (2020) dalam artikelnya "Determinants of Effective E-Procurement System: Empirical Evidence from Indonesian Local Governments," implementasi e-Katalog merupakan proses penerapan sistem pengadaan berlandaskan teknologi informasi yang dirancang dengan tujuan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan belanja publik.

Sementara itu, Menurut Silalahi et al. (2023) dalam studi "Determinants Influencing Fraud Prevention in E-Procurement: Empirical Evidence from Indonesia," implementasi e-procurement dipahami sebagai penerapan sistem digital dalam seluruh proses pengadaan publik yang bertujuan untuk meminimalkan praktik penyimpangan, memperkuat pengendalian internal, serta memastikan efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran.

Dengan demikian, Implementasi e-Katalog merupakan proses strategis penerapan sistem pengadaan elektronik yang bertujuan menciptakan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang/jasa pemerintah. Keberhasilannya ditentukan oleh kesiapan teknologi, dukungan organisasi, kompetensi sumber daya manusia, serta integritas sistem dalam mencegah penyimpangan dan mendukung tata kelola yang bersih.

Menurut Nani dan Ali (2020) dalam "Determinants of Effective E-Procurement System: Empirical Evidence from Indonesian Local Governments," implementasi e-procurement efektif ditentukan oleh lima dimensi utama yang dikenal dengan STOPE Framework, yaitu:

1. Strategy (Strategi Implementasi)
   Menunjukkan sejauh mana organisasi memiliki arah strategis dan komitmen manajerial dalam menerapkan sistem e-Katalog. Dimensi ini mencakup visi kebijakan digital, dukungan pimpinan, dan rencana implementasi yang terukur.
2. Technology (Kesiapan Teknologi) Menggambarkan kemampuan infrastruktur digital dan sistem informasi untuk mendukung operasional e-Katalog. Meliputi ketersediaan jaringan, keamanan data, interoperabilitas sistem, dan keandalan platform e-Katalog.
3. Organization (Kesiapan Organisasi)
   Menunjukkan struktur, prosedur, dan budaya kerja yang mendukung penerapan sistem digital. Dimensi ini terkait dengan tata kelola internal, koordinasi antarbagian, dan dukungan sumber daya.
4. People (Kapasitas SDM)
   Mengacu pada kemampuan, pelatihan, dan motivasi sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem e-Katalog. Meliputi kompetensi digital, pemahaman regulasi, dan kemampuan teknis pengguna.
5. Environment (Lingkungan Eksternal dan Regulasi)

Menjelaskan pengaruh faktor eksternal seperti dukungan kebijakan pemerintah, regulasi nasional, dan kesiapan pasar. Dimensi ini mencerminkan ekosistem kebijakan dan kepercayaan publik terhadap sistem e-Katalog.

Implementasi e-Katalog sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya, yaitu (Sabdono, 2025), (Pramudita, Prapsetyo, & Lestari, 2025), (Zaman & Megasari, 2025), dan (Wibowo & Ali, 2024).

Review Artikel Relevan

Kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu dilakukan untuk menjadi dasar dalam perumusan hipotesis penelitian. Proses ini melibatkan penelaahan terhadap hasil penelitian yang relevan, dengan menjelaskan kesamaan dan perbedaan antara penelitian sebelum nya dan penelitian yang sedang dilakukan. Ringkasan hasil kajian tersebut disajikan pada Tabel 1, yang memuat penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung dan menjadi acuan dalam pengembangan hipotesis penelitian ini.

Tabel 1. Hasil Penelitian Relevan

No	Author (Tahun)	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan Dengan Artikel Ini	Perbedaan Dengan Artikel Ini	H
1	W Mgimba, 2022	Kompetensi PPK dan Kapabilitas pelaksana proyek berpegaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa	Kompetensi PPK berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa	Kapabilitas pelaksana proyek berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa	H1
2	R. Matee (2023)	Kompetensi PPK dan kinerja penyedia, kepatuhan terhadap prosedur pengadaan berpegaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa	Kompetensi PPK berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa	kinerja penyedia, kepatuhan terhadap prosedur pengadaan berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa	H1
3	Scala, B., & Lindsay, C. F. (2021)	Kapabilitas Penyedia dan koordinasi digital berpegaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa	Kapabilitas Penyedia berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa	koordinasi digital berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa	H2
4	Karttunen, E., Matela, M., Hallikas, J., & Immonen, M. (2022)	Kapabilitas Penyedia dan Efektivitas berpegaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa	Kapabilitas Penyedia berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa	Efektivitas berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa	H2
5	Irawan, B., Susena, K. C., & Hardinata, D. (2025)	Implementasi e-Katalog dan Kesiapan SDM berpegaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa	Implementasi e-Katalog berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa	Kesiapan SDM berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa	H3
6	Handayani, R. S., et al. (2025)	Implementasi e-Katalog dan Efisiensi biaya berpegaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa	Implementasi e-Katalog berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa	Efisiensi biaya berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa	H3

Pembahasan

Berdasarkan Kajian teori maka pembahasan artikel *literature review ini* adalah melakukan review artikel yang relevan**,** analisis pengaruh antar variabel dan membuat konseptual berfikir rencana penelitian:

Berdasarkan hasil penelitian maka pembahasan artikel ini adalah melakukan review artikel yang relevan**,** analisis pengaruh antar variabel dan membuat konseptual berfikir rencana penelitian

Pengaruh Kompetensi PPK terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa.

Kompetensi PPK adalah kemampuan individu yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan oleh PPK untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara efektif dan sesuai dengan peraturan. Menurut Sari et al. (2024) dan Tonelli et al. (2021), kompetensi terdiri dari dimensi teknis, manajerial, dan perilaku, yang menentukan sejauh mana pejabat publik dapat mengelola sumber daya untuk mencapai hasil optimal.

Prinsip-prinsip atau konsep Kompetensi PPK mencakup profesionalisme, integritas, tanggung jawab, serta kemampuan analitis dalam pengambilan keputusan pengadaan. PPK yang kompeten mampu menilai kebutuhan, memilih penyedia dengan objektif, serta memastikan pelaksanaan kontrak berjalan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi — elemen utama Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa.

Kompetensi PPK berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa, karena pejabat yang memiliki kemampuan teknis dan manajerial yang baik akan lebih mampu mengoptimalkan sumber daya dan mengurangi potensi penyimpangan. Jika kompetensi PPK dipersepsikan baik maka Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa akan meningkat, sebab keputusan pengadaan menjadi lebih tepat sasaran dan efisien. Sebaliknya, rendahnya kompetensi dapat menurunkan efektivitas pelaksanaan pengadaan serta meningkatkan risiko pemborosan anggaran.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Kompetensi PPK antara lain: latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan dan sertifikasi pengadaan, serta dukungan organisasi terhadap pengembangan kompetensi (Lubis, 2022; Sari et al., 2024).

Untuk meningkatkan Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa melalui peningkatan Kompetensi PPK, manajemen perlu memperkuat sistem pelatihan berkelanjutan, memperluas akses terhadap e-learning LKPP, serta menciptakan budaya kerja berbasis kinerja dan akuntabilitas. Langkah ini penting agar PPK memiliki keahlian teknis dan perilaku etis yang sesuai dengan tuntutan digitalisasi pengadaan.

Kompetensi PPK berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa, hal ini sejalan dengan penelitian Mgimba (2022) dan Matee (2023) yang menemukan bahwa kemampuan pejabat pengadaan publik berperan signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah.

Pengaruh Kapabilitas Penyedia terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa.

Kapabilitas Penyedia adalah kemampuan strategis penyedia barang/jasa dalam mengelola sumber daya, teknologi, dan hubungan kerja sama untuk memberikan produk atau layanan yang efisien dan berkualitas sesuai kebutuhan instansi pemerintah. Menurut Lubis (2022) dan Gunawan & Mutaqin (2025), kapabilitas meliputi kemampuan teknologis, manajerial, dan relasional yang menentukan daya saing penyedia dalam sistem e-procurement publik.

Prinsip-prinsip atau konsep Kapabilitas Penyedia mencakup efisiensi operasional, adaptabilitas terhadap perubahan sistem digital, dan kolaborasi strategis dengan pemerintah.

Kapabilitas yang tinggi memungkinkan penyedia memberikan solusi cepat dan tepat tanpa mengorbankan mutu, yang pada akhirnya meningkatkan Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa pengadaan publik.

Kapabilitas Penyedia berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa, karena penyedia yang memiliki kemampuan teknologis dan manajerial baik akan lebih mampu menekan biaya, mempercepat waktu pengiriman, serta menjaga kualitas produk. Jika kapabilitas penyedia tinggi maka hasil pengadaan akan lebih efisien dan berkualitas; sebaliknya, rendahnya kapabilitas menyebabkan keterlambatan dan pemborosan. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori Resource-Based View (Lubis, 2022) yang menegaskan bahwa kapabilitas merupakan sumber keunggulan kompetitif berkelanjutan bagi organisasi.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Kapabilitas Penyedia meliputi pengalaman dalam pengadaan pemerintah, investasi teknologi, sistem manajemen mutu, serta kemampuan beradaptasi terhadap regulasi dan platform digital (Aminu & Shariff, 2019; Gunawan & Mutaqin, 2025).

Untuk meningkatkan Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan pembinaan rutin terhadap penyedia, mendorong adopsi sistem informasi terintegrasi, serta menciptakan ekosistem pengadaan yang mendukung inovasi dan kolaborasi antar pihak.

Kapabilitas Penyedia berperan terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa, ini sejalan dengan penelitian Scala & Lindsay (2021) serta Karttunen et al. (2022) yang menemukan bahwa penyedia dengan kapabilitas manajerial dan teknologi tinggi berkontribusi pada efisiensi, efektivitas, dan resiliensi rantai pasok publik.

Pengaruh Implementasi e-Katalog terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa.

Implementasi e-Katalog adalah penerapan sistem elektronik yang menyediakan daftar produk dan jasa pemerintah secara daring, yang memungkinkan proses pengadaan dilakukan lebih transparan, cepat, dan terstandar. Menurut Nani & Ali (2020) serta Silalahi et al. (2023), implementasi e-procurement yang efektif mencakup ketersediaan infrastruktur digital, kepatuhan terhadap regulasi, serta kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem.

Prinsip-prinsip atau konsep Implementasi e-Katalog meliputi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kemudahan akses informasi. Sistem e-Katalog yang baik meminimalkan interaksi tatap muka yang berpotensi menimbulkan moral hazard, serta memastikan setiap transaksi dapat ditelusuri secara digital.

Implementasi e-Katalog berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa, karena sistem ini meningkatkan efisiensi biaya, mempercepat proses pengadaan, dan memperkuat pengawasan publik. Jika implementasi e-Katalog dilakukan dengan baik, maka penggunaan anggaran menjadi lebih tepat guna dan hasil pengadaan lebih berkualitas; sebaliknya, implementasi yang lemah dapat menimbulkan keterlambatan, redundansi, dan inefisiensi.

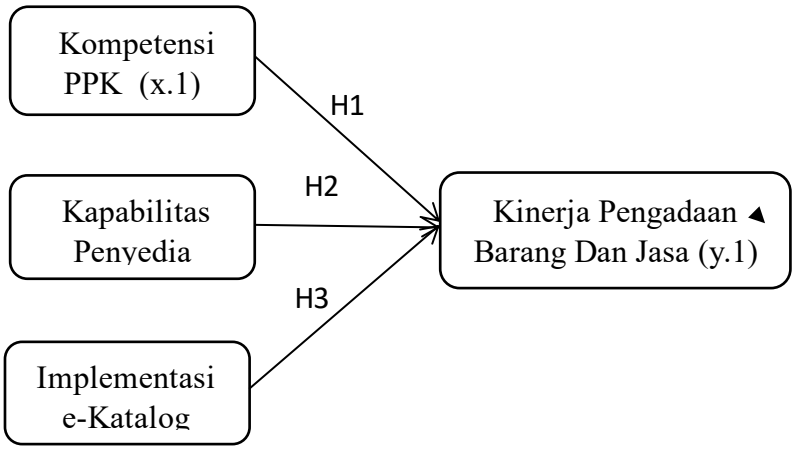
Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Implementasi e-Katalog antara lain infrastruktur teknologi, kesiapan SDM, dukungan regulasi, dan koordinasi antarinstansi (Irawan et al., 2025; Handayani et al., 2025).

Untuk meningkatkan Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa melalui implementasi e-Katalog, pemerintah perlu memperkuat integrasi data antar platform LKPP, meningkatkan literasi digital pengguna, serta memastikan pemutakhiran katalog secara berkala agar sesuai dengan kebutuhan pasar dan prinsip keterbukaan.

Implementasi e-Katalog berperan terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa, ini sejalan dengan penelitian Irawan et al. (2025) dan Handayani et al. (2025) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Katalog berkontribusi pada efisiensi biaya, transparansi, serta peningkatan kualitas layanan publik.

Rerangka konseptual Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, pembahasan dan penelitian relevan, maka di perolah kerangka konseptual artikel ini seperti gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar kerangka konseptual di atas, maka: Kompetensi PPK, Kapabilitas Penyedia, dan Implementasi e-Katalog berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa. Selain yang diatas, masih banyak variabel lain diantaranya adalah:

1. x_4: Kualitas Layanan Publik yang turut memperkuat pencapaian Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa, sebagaimana dijelaskan oleh Ali et al. (2022), Novansa & Ali (1926), dan Ali et al. (2016). Variabel ini menekankan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan publik yang dihasilkan dari proses pengadaan, maka semakin besar pula nilai publik yang tercipta.
2. x_5: Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah sebagaimana dikemukakan oleh Ali, Evi, et al. (2018), Sitio & Ali (2019), dan Ali et al. (2022). Tata kelola yang baik memperkuat integritas sistem pengadaan dan menjamin efisiensi penggunaan anggaran.
3. x_6: Inovasi dan Transformasi Digital sebagaimana dijelaskan oleh M & Ali (2017), Ali & Mappesona (2016), dan Ali, Narulita, et al. (2018). Variabel ini menggambarkan peran teknologi dan inovasi sebagai pendorong efektivitas sistem pengadaan publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan, hasil, dan pembahasan yang telah disajikan, maka artikel ini menyimpulkan temuan-temuan utama yang menjadi dasar dalam perumusan hipotesis untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1) Kompetensi PPK berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa;
2) Kapabilitas Penyedia berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa. dan
2) Implementasi e-Katalog berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa.

REFERENSI

Ali, H., & Limakrisna, N. (2013). Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Pemecahan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi (Doctoral dissertation, Tesis, dan Disertasi. In *In Deeppublish: Yogyakarta*.

Ali, H., Evi, N., & Nurmahdi, A. (2018). The Influence of Service Quality , Brand Image and Promotion on Purchase Decision at MCU Eka Hospital. *Business and Management Studies*. https://doi.org/10.21276/sjbms.2018.3.1.12

Ali, H., Limakrisna, N., & Jamaluddin, S. (2016). Model of customer satisfaction: The empirical study at Bri in Jambi. *International Journal of Applied Business and Economic*

Research.
Ali, H., & Mappesona, H. (2016). Build brand image: Analysis Service Quality and Product Quality (case study at Giant Citra Raya). *International Journal of Economic Research*.
Ali, H., Narulita, E., & Nurmahdi, A. (2018). Saudi Journal of Business and Management Studies (SJBMS) The Influence of Service Quality , Brand Image and Promotion on Purchase Decision at MCU Eka Hospital. *Business and Management Studies*. https://doi.org/10.21276/sjbms.2018.3.1.12
Ali, H., Zainal, V. R., & Ilhamalimy, R. R. (2022). Determination of Purchase Decisions and Customer Satisfaction: Analysis of Brand Image and Service Quality (Review Literature of Marketing Management). *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, *3*(1), 141–153. https://doi.org/10.31933/dijdbm.v3i1.1100
Anggita, R., & Ali, H. (2017). The Influence of Product Quality, Service Quality and Price to Purchase Decision of SGM Bunda Milk (Study on PT. Sarihusada Generasi Mahardika Region Jakarta, South Tangerang District). *Scholars Bulletin*. https://doi.org/10.21276/sb
Fanelli, S., Lanza, G., Enna, C., & Zangrandi, A. (2020). Managerial competences in public organisations: the healthcare professionals' perspective. BMC health services research, 20(1), 303. https://doi.org/10.1186/s12913-020-05179-5
Gunawan, E., & Mutaqin, M. I. (2025). Tantangan dan Strategi Pengembangan Sistem Informasi Kinerja Penyedia dalam Tata Kelola Pengadaan Publik Indonesia. Jurnal Pengadaan Indonesia, 4(1), 40-50.
Handayani, R. S., Hendarwan, H., Siahaan, S., Purnamasari, T., Despitasari, M., Yulianto, A., ... & Su'udi, A. (2025). E-catalogues strategies for ensuring access to medicines as a vital component of universal health coverage. In Digital Healthcare, Digital Transformation and Citizen Empowerment in Asia-Pacific and Europe for a Healthier Society (pp. 273-285). Academic Press.
Hasyim, U., & Ali, H. (2022). Reuse Intention Models Through Customer Satisfaction During The Covid-19 Pandemic : Cashback Promotion And E-Service Quality Case Study : Ovo Electronic Money In. *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, *3*(3), 440–452.
Irawan, B., Susena, K. C., & Hardinata, D. (2025). Implementation Of Government Procurement Of Goods/Services For Print And Duplication Expenditure Through E-Catalogue In South Bengkulu Regency. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 13(2), 1593-1602.
Karttunen, E., Matela, M., Hallikas, J., & Immonen, M. (2022). Public procurement as an attractive customer: a supplier perspective. International Journal of Operations & Production Management, 42(13), 79-102.
Lubis, N. W. (2022). Resource Based View (RBV) in Improving Company Strategic Capacity. Research Horizon, 2(6), 587–596. https://doi.org/10.54518/rh.2.6.2022.85
Matee, R. (2023). FACTORS AFFECTING ACHIEVEMENT OF KINERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA IN PROCUREMENT OF GOODS, SERVICES AND WORKS IN MTWARA DISTRICT COUNCIL (Doctoral dissertation, Institute of Accountancy Arusha (IAA)).
Meynhardt, T., Brieger, S. A., Strathoff, P., Anderer, S., Bäro, A., Hermann, C., ... & Gomez, P. (2016). Public value performance: What does it mean to create value in the public sector?. In Public sector management in a globalized world (pp. 135-160). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
M, A., & Ali, H. (2017). Model Kepuasan Pelanggan: Analisis Kualitas Produk Dan Kualitas Layanan Terhadap Citra Merek Pada Giant Citra Raya Jakarta. *Jurnal Manajemen*. https://doi.org/10.24912/jm.v21i3.254
Mgimba, W. (2022). Contribution of personnel qualities in attaining Kinerja Pengadaan Barang

Dan Jasa through force account method in public procurement in Tanzania.
Milani, R., Fadli, U. M. D., & Khalida, L. R. (2025). Analisis Kinerja Layanan Karyawan Pengadaan Barang dan Jasa di Perum Peruri. Journal of Economics and Business UBS, 14(5), 1284-1298.
Nani, D. A., & Ali, S. (2020). Determinants of effective e-procurement system: Empirical evidence from Indonesian local governments. Jurnal dinamika akuntansi dan bisnis, 7(1), 33-50.
Natalia, N., & Ali, H. (2024). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas dan Kinerja Karyawan: Analisis Kompetensi dan Motivasi. Jurnal Pendidikan Siber Nusantara, 2(4), 189-194.
Novansa, H., & Ali, H. (1926). Purchase Decision Model: Analysis of Brand Image, Brand Awareness and Price (Case Study SMECO Indonesia SME products). *Saudi Journal of Humanities and Social Sciences*. https://doi.org/10.21276/sjhss
Paz, L. M. C. Á., & Odelius, C. C. (2021). Managerial competencies scale in a public management context: development and validation evidences. Organizações & Sociedade, 28(97), 370-397. https://doi.org/10.1108/RAUSP-04-2020-0074
Ridwan, M., & Anggrawati, A. (2017). Konsep Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa: Alternatif Pengukuran Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Luwu Timur. ASSETS: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 7(1), 104-119.
Sari, S. M., & Ali, H. (2024). Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS), 5(5).
Scala, B., & Lindsay, C. F. (2021). Supply chain resilience during pandemic disruption: evidence from healthcare. Supply Chain Management: An International Journal, 26(6), 672-688.
Silalahi, S., Hanif, R. A., Supriono, S., Hariyani, E., & Wiguna, M. (2023). Determinants influencing fraud prevention in e-procurement: Empirical evidence from Indonesia. Innovative Marketing, 19(4), 199-206.
Sitio, T., & Ali, H. (2019). Patient Satisfaction Model and Patient Loyalty: Analysis of Service Quality and Facility (Case Study at Rawamangun Special Surgery Hospital). *Scholars Bulletin*. https://doi.org/10.36348/sb.2019.v05i10.002.
Wibowo, P., & Ali, H. (2024). Pengaruh Aksesibilitas, Biaya Implementasi dan Kompetensi SDM terhadap Sistem Informasi Manajemen. Dinasti Information and Technology, 2(2), 84-96.